



ບໍລິເມັດ ກູບາບິຣຸນິ ທານິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄວາມ ບໍລິເມັດ ກູບາບິຣຸນິ ທານິ

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

ຄະນະກຳມະການ ບຸກຄະລາກອນ ບຸກຄະລາກອນ ທານິ (ບໍລິເມັດ) ກູບາບິຣຸນິ ທານິ (ບໍລິເມັດ) ກູບາບິຣຸນິ ທານິ
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

Bali, 02 September 2022

Kepada
Yth. Kepala Bappeda Provinsi Bali
di -
Bali

SURAT PENGANTAR
NOMOR : B.27.910/4403/SET/DPMA

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022	1 (satu) gabung	Dengan hormat disampaikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022, untuk memenuhi Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor : 4590 Tahun 2022 tanggal 29 Agustus 2022.


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I G. A. K. Kartika Jaya Seputra
 NIP. 19680613 199403 1 012

Tembusan kepada Yth.
1. Inspektur Provinsi Bali di Bali.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2022



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

"OM SWASTYASTU"

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas *Asung Kerta Wara Nugraha-Nya*, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja yakni dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dan bertahap, mengacu *core business* Perangkat Daerah dan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan. Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja yakni untuk menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2022 dalam upaya memperkuat kedudukan Tugas dan Fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan Kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan, Pawongan* dan *Palemahan* dan pada Awalnya dapat mewujudkan *Kasukretan* Desa Adat. Rancangan Akhir Perubahan Renja ini juga dapat memberikan panduan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sejalan dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2022.

Demikian disampaikan terima kasih.

"OM SANTI, SANTI, SANTI, OM"

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA DINAS
	I G. A. K. Kartika Jaya Seputra
	NIP. 19680613 199403 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan II	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	18
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Bali	22
2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT ROVINSI BALI	27
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022.....	40
3.3 Program dan Kegiatan.....	42

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2022.....	50
BAB V	PENUTUP.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Skala Nilai Peringkat Kinerja	7
Tabel 2.2	: Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan II	12
Tabel 2.3	: Realisasi dan Proyeksi capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 - 2023.....	19
Tabel 2.4	: Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022.....	23
Tabel 2.5	: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2022 Provinsi Bali	30
Tabel 3.1	: Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022.....	41
Tabel 3.2	: Rumusan Rancangan Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan maju Tahun 2023 Provinsi Bali	43
Tabel 4.1	: Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, rencana pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mengamanatkan masing-masing Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD dan Renja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dinas Pemajuan Masyarakat Adat sebagai perangkat daerah juga berkewajiban menyusun perencanaan baik yang bersifat jangka menengah 5 (lima) tahun Renja maupun tahunan. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat dan fungsi dinas pemajuan masyarakat adat sebagai perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat.

Dalam Tata kehidupan *Krama* Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat atau disebut dengan *Desa Mawacara*. Desa Adat merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinal, dan asasi) hasil karya dari para Leluhur/Tetua Bali. Bali dan *Kramanya* memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan yang sangat tinggi berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas / unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas yang tinggi. Tata kehidupan *Krama* Bali dengan kebudayaan tinggi tersebut diwadahi dalam Desa Adat. Desa Adat menjadi wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya. Tata kehidupan *Krama* Bali yang khas/unik, indah, dan menarik, juga menjadi alam kehidupan yang *metaksu*. Visi Pemerintah Provinsi Bali adalah **NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA MENUJU BALI ERA BARU**, dan Misi yang diemban oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah **Misi 12** : yaitu Memperkuat Kedudukan, Tugas dan Fungsi Desa Pakraman/Desa Adat Dan Subak Dalam Menyelenggarakan Kehidupan *Krama* Bali Yang Meliputi *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2022 didasari oleh beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terAwal Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 No 3, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. (Berita Daerah Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (5-131/2021), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7).
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 nomor 34);
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4);
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56).
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja ini dimaksud :
 - a. Sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dan bertahap, mengacu *core business* SKPD.
 - b. Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja ini bertujuan :
 - a. Menyelaraskan perubahan program dan kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2022; dan
 - b. Memberikan panduan terhadap pelaksanaan perubahan program dan kegiatan yang sejalan dengan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini diuraikan mengenai proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan perencanaan lainnya dan maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022, Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting yaitu memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (tahun berjalan) mengacu pada APBD tahun berjalan dan Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

Bab III Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Dalam bab ini memuat tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Daerah serta Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya Penguatan dan Pemberdayaan Adat di Provinsi Bali,

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2022, Dalam bab ini diuraikan mengenai Rancangan Akhir perubahan pagu anggaran dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022. Pengalokasian Rancangan Akhir perubahan pagu anggaran masing program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu program prioritas untuk mendukung pencapaian target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022.

Bab V Penutup

Lampiran-lampiran.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan II.

A. Instrumen Evaluasi terhadap Hasil Renja

Instrumen yang digunakan untuk pengendalian dan evaluasi Renja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang ditambah dengan dokumen pendukung berupa dokumen realisasi fisik dan keuangan tahun 2022 sampai dengan triwulan II dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan. Skala nilai peringkat kinerja dengan menggunakan kriteria dalam Tabel T-E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil rendah dan sangat rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

B. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan.

Evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan suatu program. Evaluasi merupakan cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas. Melaksanakan evaluasi sangat penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 secara prinsip merupakan proses penilaian terhadap kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2022 dan sebagian telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian sasaran strategis yang sudah ditetapkan Dinas pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa program dan kegiatan Tahun 2022 yang perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 sampai dengan triwulan II dapat digambarkan kinerja output sebagai berikut :

1. Sub kegiatan yang realisasi kinerja outputnya diatas 50% ada sebanyak 8 sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - f. Pembinaan Pemerintahan Desa Adat;
 - g. Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat;
 - h. Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan.
2. Sub kegiatan yang realisasi kinerja outputnya dibawah 50% ada sebanyak 8 sub kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - e. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - f. Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat;
 - g. Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat;
 - h. Pembinaan SDM Lembaga Adat.
3. Sub kegiatan yang realisasi keuangannya diatas 50% ada sebanyak 2 sub kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pembinaan Pemerintahan Desa Adat;
4. Sub kegiatan yang realisasi kinerjanya dibawah 50% ada sebanyak 14 sub kegiatan yaitu :
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - g. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

- h. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- j. Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat;
- k. Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat;
- l. Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat;
- m. Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan.
- n. Pembinaan SDM Lembaga Adat.

Secara keseluruhan rata – rata realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah mencapai 46,63 persen dengan realisasi keuangan mencapai 63,73 persen. Beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum cermatnya penetapan terhadap target program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga target tersebut dalam pelaksanaannya sulit terpenuhi.
2. Kurang cermatnya dalam penyusunan tahapan pelaksanaan eksekusi belanja sehingga realisasi kegiatan tidak mencapai target yang ditetapkan tahun 2022 sampai dengan triwulan II.
3. Beberapa kegiatan dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa hambatan, baik dari segi teknis maupun administrasi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, berikut langkah-langkah yang diperlukan pada triwulan-triwulan berikutnya, antara lain seperti :

1. Perlunya pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas.
2. Perlunya penataan kembali terhadap desain Rancangan Akhir Renja 2022 agar pelaksanaan lebih efektif dan berkualitas serta efisien.
3. Perlu melakukan konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan melalui dukungan penganggaran dengan pendekatan efektif-efisien dengan mendukung capaian output yang berkualitas.

4. Mengoptimalkan sumber daya untuk tetap dapat mencapai target kinerja semaksimalnya dengan keterbatasan anggaran.

Selanjutnya rekapitulasi capaian realisasi kinerja output dan keuangan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.2.
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan
Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Per Tahun		Realisasi Sampai Dengan Triwulan II				Keterangan
							Keuangan	Kinerja	Keuangan	%	Kinerja	%	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
2	22				Bidang Urusan Kebudayaan								
2	22	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi								
2	22	01	1.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.861.000	9	5.177.937	37,36	7	77,78	
2	22	01	1.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	13.861.000	9	5.177.937	37,36	7	77,78	

2	22	01	1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diproses	9.255.081.424	52	4.719.522.105	50,99	20	38,46	
2	22	01	1.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang diproses	9.255.081.424	52	4.719.522.105	50,99	20	38,46	
2	22	01	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan barang dan jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diproses	926.368.900	4.096	148.247.051	16,00	62	1,51	
2	22	01	1.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang diadakan dan siap pakai	24.354.200	794	0	0	37	4,66	
2	22	01	1.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jasa pengadaan dan cetak yang diproses dan siap pakai	46.565.700	2.937	0	0	0	0	
2	22	01	1.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang diadakan	17.216.000	12	3.566.000	20,71	6	50	
2	22	01	1.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	838.233.000	341	144.681.051	17,26	19	5,57	

2	22	01	1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang diadakan dan siap pakai	1.227.789.000	15	79.694.558	6,49	10	66,67	
2	22	01	1.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses	1.227.789.000	15	79.694.558	6,49	10	66,67	
2	22	01	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia dan siap pakai	944.382.250	35	173.570.445	18,38	15	42,85	
2	22	01	1.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit alat tulis kantor yang tersedia dan siap pakai	944.382.250	35	173.570.445	18,38	15	42,85	
2	22	01	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	3.290.585.924	30	1.057.152.652	32,13	17	56,67	
2	22	01	1.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan siap pakai	1.384.600.896	6	477.584.240	34,49	5	83,33	
2	22	01	1.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa kebersihan kantor dan taman yang dilaksanakan Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1.905.985.028	12 12	579.568.412	30,41	6 6	50,00 50,00	

2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan							
2	22	09	8.01		Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah keluaran pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	459.066.605.985	6.652	298.416.950.742	65,00	5.557	83,52	
2	22	09	8.01	01	Sub Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesuai ketentuan	457.870.600.242	300	298.235.644.486	65,14	0	0	
						Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan		1.493			1.489	99,73	
						Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan		1.493			1.492	99,93	
						Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun		1			1	100	
						Jumlah proposal pencairan dana desa adat yang diverifikasi		1.493			1.489	99,73	

2	22	09	8.01	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah produk hukum Desa Adat yang diregistrasi Jumlah Produk Hukum Adat yang teraploud melalui aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT) Jumlah Wicara Adat yang difasilitasi	1.196.005.744	500 375 4	181.306.256	15,16	118 967 1	23,60 257,87 25,00	
2	22	09	8.02		Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	705.727.988	35	178.554.545	25,30	0	0	
2	22	09	8.02	01	Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah LPD yang mengikat kreterianya menjadi sehat Jumlah Pararem PD yang tersusun	151.055.550	15 1	23.997.625	15,89	0 0	0 0	
2	22	09	8.02	02	Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi Jumlah Desa Adat yang memiliki kerjasama Jumlah Pararem BUPDA yang tersusun Jumlah Pararem Kerjasama yang tersusun	554.672.438	15 2 1 1	154.556.920	27,86	0 0 0 0	0 0 0 0	

2	22	09	8.03		Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pembangunan Desa Adat dan Subak yang diproses	632.068.892	2.728	155.226.580	24,54	1.611	59,05	
2	22	09	8.03	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah data dan informasi potensi Desa Adat yang tersusun Jumlah proposal pencairan dana Subak dan Subak Abian yang diverifikasi Jumlah laporan Pendataan Subak dan Subak Abian	632.068.892	1 2.726 1	155.226.580	24,54	0 1.611 0	0 59,10 0	
2	22	09	8.04		Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen, SDM, dan Lembaga Adat yang berkualitas	3.008.843.629	2003	402.966.060	13,39	0	0	
2	22	09	8.04	03	Sub Kegiatan Pembinaan SDM Lembaga Adat	Jumlah Paiketan/Pasikian Lembaga Adat yang dibantu Jumlah buku/pedoman/juknis Lembaga Adat yang disusun	3.008.843.629	2000 3	402.966.060	13,39	0 0	0 0	
Total							479.071.323.992	15.653	305.337.062.674	63,73	7.299	46,63	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Dalam upaya mendukung Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu "**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju BALI ERA BARU, yang mengandung makna menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan *Krama* Bali yang Sejahtera dan Bahagia, *Sakala-Niskala* Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945. Serta mendukung Misi 12 : Penguatan Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Desa Pakraman/Desa Adat Dan Subak Dalam Menyelenggarakan Kehidupan *Krama* Bali Yang Meliputi *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yaitu Terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat. *Kasukretan* Desa Adat diukur dari semakin meningkatnya kemandirian Desa Adat dalam penyelenggaraan Kehidupan *Krama* Bali. Terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat difokuskan pada meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat, meningkatnya kualitas Perekonomian Desa Adat, meningkatnya kualitas Hukum Adat, serta meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat.

Progres Realisasi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali , lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Realisasi dan Proyeksi Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2020 - 2023

NO	Indikator Sasaran	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (tahun n-3)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2019 (tahun n-3)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1.	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	-	-	-	6,70	8,57	12,06	15,07	-	7,03	7,97%	12,06	15,07	
2.	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-	-	-	75	80	82	83	-	N/A	80,39	82	83	
3.	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	-	-	-	25,11	30,14	31,81	33,49	-	29,87	46,55 %	31,81	33,49	
4.	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomian baik	-	-	-	0,05	9,18	14,53	20,09	-	0,07	0,27 %	3,82	20,09	

NO	Indikator Sasaran	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (tahun n-3)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2019 (tahun n-3)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
5.	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	-	-	-	60,28	94,44	94,77	95,44	-	93,84	93,84 %	94,77	95,44	
6.	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perencanaan Pembangunannya baik	-	-	-	70,33	75,02	77,03	80,37	-	73,01	73,01 %	77,03	80,37	
7.	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggarakan kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan	-	-	-	54,98	75,02	100	100	-	99,87	99,93	100	100	
8.	Persentase Subak berdaya dalam kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan	-	-	-	60,01	98,50	98,50	100	-	98,50	97,76	100	100	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu yang dihadapi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat dan belum mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2019 yaitu Kapasitas Prajuru Desa Adat Dalam Pemerintahan Desa Adat Belum Optimal
2. Tata Kelola Perekonomian Desa Adat belum Optimal :
 - a. Dalam 5 (lima) tahun terawal Perubahan terjadinya penurunan jumlah LPD dengan kriteria sehat, pada tahun 2016 sebesar 67,06% dimana tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 50,35% dan pada tahun 2021 terjadi penurunan lagi menjadi 42% ;
 - b. Beberapa Desa Adat sudah membentuk Unit Usaha Sektor Riil atau Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA).
 - c. Masih minimnya Desa Adat yang mengadakan kerjasama dibidang Perekonomian Desa Adat.
3. Pemajuan Hukum Adat (*Awig-Awig* dan *Pararem*) belum sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yaitu :
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan pendaftaran/registrasi *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat. Pada tahun 2021 Produk Hukum Adat yang diregistrasi sebanyak 363, terdiri dari 362 *Pararem* dan 1 *Awig-Awig*
4. Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa Adat belum berjalan Optimal yaitu :
 - a. Belum semua Desa Adat yang menyusun Dokumen perencanaan 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun;
 - b. Belum tersedianya data dan informasi yang memadai tentang pembangunan *baga parahyangan*, *palemahan* dan *pawongan*;
 - c. Belum optimalnya proses perencanaan, penataan kawasan, pelaksanaan pembangunan di Desa Adat.

5. Isu-isu terkait *Subak* :
 - a. Belum terdatanya *Subak* dan *Subak Abian* secara optimal, dan belum sinkronnya jumlah data *Subak* dan *Subak Abian* antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi;
 - b. Alih fungsi lahan, sejumlah *subak* khususnya di daerah perkotaan tidak lagi memiliki lahan pertanian (*palemahan* dan *pawongan*), hanya tersisa *parahyangamya* saja.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Bali.

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali perlu adanya penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan antara Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Bali dengan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemajuan masyarakat Adat Provinsi Bali. Dari hasil review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2022, didapat bahwa jumlah program antara Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Bali dengan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemajuan masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu sebanyak 2 (dua) Program.

Pada Rancangan Akhir Perubahan Renja tahun 2022 dirancang 10 (sepuluh) kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan. Pagu indikatif pada Anggaran Induk dirancang sebesar Rp. 479.071.323.992,- (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), sedangkan pada Perubahan Renja Tahun 2022 pagu indikatif dianggarkan sebesar Rp. 483.384.050.031,- (empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu tiga puluh satu rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 4.312.726.039 (empat miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah). Mengacu pada data tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pagu indikatif antara Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2022 dengan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemajuan masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sama, lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								479.071.323.992	483.384.050.031			541.630.818.449					
2	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								15.658.077.498	15.970.803.537			20.608.909.265					
2	2	0	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								13.861.000	13.861.000			83.297.665					
2	2	0	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	9 Dokumen	9 Dokumen	6 %	6 %	13.861.000	13.861.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	83.297.665
2	2	0	1			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9.255.081.424	9.567.807.463			11.659.511.600				
2	2	0	1	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang diproses	Persentase pelayanan administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	52 Dokumen	52 Dokumen	100 %	100 %	9.255.081.424	9.567.807.463	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	11.659.511.600

2	2	0	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah										926.368.900	926.368.900					1.864.000.000	
2	2	0	1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang diadakan dan siap pakai	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	794 Unit	794 Unit	100 %	100 %	24.354.200	24.354.200	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	46.000.000
2	2	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah jasa penggandaan dan cetak yang diproses dan siap pakai	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	2937 Unit	2937 Unit	100 %	100 %	46.565.700	46.565.700	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	130.000.000
2	2	0	1	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	17.216.000	17.216.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	8.000.000
2	2	0	1	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakann	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	341 Kali	341 Kali	100 %	100 %	838.233.000	838.233.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	1.680.000.000
2	2	0	1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										1.227.798.000	1.227.798.000					2.510.000.000	
2	2	0	1	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses	Persentase lancarnya pelayanan perkantoran dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	15 Unit	15 Unit	100 %	100 %	1.227.798.000	1.227.798.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	2.510.000.000

2	2	0	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										944.382.250	944.382.250					1.072.100.000	
2	2	0	1	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah Unit alat Tulis Kantor yang tersedia dan siap pakai	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	35 Unit	35 Unit	100 %	100 %	944.382.250	944.382.250	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	1.072.100.000
2	2	0	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3.290.585.924	3.290.585.924					3.420.000.000	
2	2	0	1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan siap pakai	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	1.384.600.896	1.384.600.896	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	1.185.000.000
2	2	0	1	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah jasa kebersihan kantor dan taman yang dilaksanakan Jumlah Jasa Pemeliharaan Gedung kantor yang dilaksanakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	100 %	100 %	1.905.985.028	1.905.985.028	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	2.235.000.000

2	2	0			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI										463.413.246.494	467.413.246.494			521.021.909.184			
2	2	0	1		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat										459.066.605.985	463.066.605.985			510.500.000.000			
2	2	0	1	0	Pembinaan Pemerintah Desa Adat	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelengga rakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	Jumlah Desa Adat yang Menyampaika Dokumen Penggangan Tepa Waktu dan sesuai Ketentuan Jumlah Desa Adat Yang Menyampaika Dokumen Pertanggungj awaba Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesua ketentuan Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa ada yang disusun Jumlah Proposal Pencairan Dana Des Adat yang diverifika	Persentase Desa Adat yang tata kelola pemerintahan Desa Adatnya baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1493 Desa Adat 1493 Desa Adat 300 Desa Adat 1 Juknis 1493 Proposal	1493 Desa Adat 1493 Desa Adat 300 Desa Adat 1 Juknis 1493 Proposal	75 %	75 %	457.870.600.241	461.870.600.241	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelengga ra kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	100 Persen	509.100.000.000

2	2	0	1	0	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggara rakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	Jumlah Produk Hukum Adat yang diregistrasi Jumlah Produk Hukum Adat yang Teraploud melalui Aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT) Jumlah Wicara Adat Yang di Fasilitasi	Persentase Desa Adat yang tata kelola pemerintahan Desa Adatnya baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	500 Produk Hukum 375 Produk Hukum 4 Wicara	500 Produk Hukum 375 Produk Hukum 4 Wicara	75 %	75 %	1.196.005.744	1.196.005.744	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggara ra kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	100 Persen	1.400.000.000
2	2	0	1		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat										705.727.988	705.727.988					1.283.279.392	
2	2	0	1	0	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggara rakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	Jumlah LPD Yang Meningkatkan Kriteria Menjadi Sehat Jumlah Pararem LPD yang tersusun	Persentase Desa adat yang memiliki Lembaga Perekonomian Desa Adat yang sehat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	15 LPD 1 Pararem	15 LPD 1 Pararem	3,82 %	3,82 %	151.055.550	151.055.550	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggara ra kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	100 Persen	408.100.000

2	2	0	1	0	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggara kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	Jumlah Desa Adat yang memiliki Kerjasama Jumlah Pararem BUPDA yang tersusun Jumlah Pararem Kerjasama yang tersusun Jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi	Persentase Desa adat yang memiliki Lembaga Perekonomian Desa Adat yang sehat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen 1 Pararem 1 Pararem 15 BUPDA	2 Dokumen 1 Pararem 1 Pararem 15 BUPDA	3,82 %	3,82 %	554.672.438	554.672.438	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggara kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	100 Persen	875.179.392	
2	2	0	1	0	Penyelenggaraan Desa Adat											632.068.892	632.068.892			2.110.675.792		
2	2	0	1	0	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam penyelenggaraan kegiatan parahyangan, Pawongan dan Palemahan Persentase Subak yang berdaya dalam menyelenggara kegiatan parahyanga Pawongan dan Palemahan	Jumlah data dan informasi potensi desa adat yang tersusun Jumlah laporan Pendataan Subak dan Subak Abian yang tersusun Jumlah proposal pencairan dana subak dan subak abian yang diverifikasi	Persentase Desa Adat yang sudah menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Adat sesuai dengan ketentuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen 2726 Dokume	1 Dokumen 1 Dokumen n 2726 Dokume	40 %	40 %	632.068.892	632.068.892	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam penyelenggaraan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan Persentase Subak yang berdaya dalam penyelenggaraan kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan	100 Persen	100 Persen	2.110.675.792

2	2	0	1		Pembinaan Sumber Daya Manusia										3.008.843.629	3.008.843.629				7.127.954.000		
2	2	0	1	0	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggara rakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	Jumlah buku/pedoman/juk Lembaga Adat yang disusun Jumlah Paiketan/Pasikian Lembaga Adat yang dibentuk	nis Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 buku/pedoman 2000 Paiketan	a3nb/jukun /ispedom /P2a0s0ik0i aPnaiketan	an/juknis ,300 Orang Pasikian	300 Orang	3.008.843.629	3.008.843.629	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Des Adat yang berd dalam menyelenggara ra kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	a aya kan 100 Persen	7.127.954.000
TOTAL															479.071.323.992	483.384.050.031				541.630.818.449		

2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penguatan dan pemberdayaan Desa Adat di Provinsi Bali dilaksanakan melalui Forum Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dilaksanakan secara *Virtual* pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 bertempat di Ruang kerja kantor masing-masing. Forum Perangkat Daerah ini melibatkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Adat, Majelis Desa Adat, Kelompok Ahli, lembaga adat, maupun dari Perangkat Daerah Provinsi, dan kabupaten/kota yang terkait. Jumlah usulan program dan kegiatan dari peserta Forum adalah sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan dengan 33 Sub Kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Target Tahun n	Target Tahun n+1	Target Tahun n	Target Tahun n+1
1		2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82%	83%	18.520.541.274	20.608.909.265
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran (output) : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	13	13	82.500.200	83.297.665
		Hasil (outcome) : Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	6%	6%	-	-
	Sub Kegiatan :					
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran (output) : Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	5	6	26.334.200	26.500.000

	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran (output) : Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1	1	7.432.000	7.597.665
	1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran (output) : Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1	1	7.432.000	7.500.000
	1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran (output) : Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1	1	8.156.000	8.200.000
	1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran (output) : Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1	1	9.242.000	9.300.000
	1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran (output) : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	8.156.000	8.200.000
	1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran (output) : Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3	3	15.748.000	16.000.000
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran (output) : Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	57	57	11.029.764.000	11.659.511.600
			Hasil (outcome) : Persentase pelayanan administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	-	-
		Sub Kegiatan :					
	1.8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran (output) : Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN/Tambahan	52	52	11.029.764.000	11.659.511.600
	3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran (output) : Jumlah unit Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.234	4.234	1.853.464.200	1.864.000.000
			Hasil (outcome) : Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	-	-
	1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran (output) : Jumlah unit pengadaan komponen instalasi listrik	794	794	45.599.000	46.000.000

	1.13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran (output) : Frekwensi upacara keagamaan yang dilaksanakan	12	12	565.000.000	565.000.000
	1.14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran (output) : Jumlah unit pengadaan barang cetak yang diproses dan siap pakai	2.937	2.937	127.971.200	130.000.000
			Jumlah jasa penggandaan yang diproses	12	12	-	-
	1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran (output) : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	504	504	4.450.000	8.000.000
	1.16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran (output) : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	75	75	1.110.444.000	1.115.000.000
	4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran (output) : Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai	28	28	1.347.919.000	2.510.000.000
			Hasil (outcome) : Persentase lancarnya pelayanan perkantoran dengan baik	100%	100%	-	-
	Sub Kegiatan :						
	1.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran (output) : Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses	28	28	1.347.919.000	1.347.919.000
	5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran (output) : Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	1.062.792.350	1.072.100.000
			Hasil (outcome) : Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-
	Sub Kegiatan :						
	1.18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran (output) : Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	850	850	2.020.000	2.100.000
			Jumlah Jasa Pengiriman Yang Diproses	12	12	-	-

		1.19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran (output) : Jumlah tagihan telepon, air dan listrik yang diproses	36	36	882.000.000	890.000.000
		1.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran (output) : Jumlah unit alat tulis kantor yang tersedia	35	35	178.772.350	180.000.000
	6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran (output) : Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	9	9	3.144.101.524	3.420.000.000
				Hasil (outcome) : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	100%	100%	-	-
		1.21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran (output) : Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	11	11	650.888.600	810.000.000
		1.23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran (output) : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2	2	370.881.896	375.000.000
		1.24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran (output) : Jumlah jasa kebersihan kantor dan taman yang dilaksanakan	12	12	1.791.342.340	1.900.000.000
				Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	12	12	-	-
				Jumlah frekwensi upacara keagamaan yang dilaksanakan	396	396	-	-
		1.25	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran (output) : Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	65	65	330.988.688	335.000.000
II			Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	30%	40%	468.433.464.498	520.021.909.184
	7		Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Keluaran (output) : Jumlah pedoman kelembagaan yang disusun dan dipahami oleh Desa Adat	1	1	460.786.004.510	510.500.000.000

			Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	70		-	-
		Sub Kegiatan :					
	1.26	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Keluaran (output) : Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesuai ketentuan	300	300	9.002.317.380	9.100.000.000
	1.27	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Keluaran (output) : Jumlah Produk Hukum Adat yang diregistrasi	1.493	1.493	1.388.714.744	1.400.000.000
			Jumlah <i>Wicara</i> Adat yang difasilitasi	4	4	-	-
			Jumlah Produk Hukum Adat yang Teraploud melalui Aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT)	375	375	-	-
			Jumlah Pedoman produk hukum Desa Adat yang disusun	1	-	-	-
	1.28	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat	Keluaran (output) : Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun	1	1	450.394.972.386	500.000.000.000
			Keluaran (output) : Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan	1.493	1.493	-	-
			Keluaran (output) : Jumlah Desa Adat yang menyampaikan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan	1.493	1.493	-	-
			Keluaran (output) : Jumlah proposal pencairan dana desa adat yang diverifikasi	1.493	1.493	-	-
8		Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Keluaran (output) : Jumlah Desa Adat yang dibina dalam Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	300	300	1.166.617.792	1.283.279.392

			Hasil (outcome) : Persentase Desa adat yang memiliki Lembaga Perekonomian Desa Adat yang sehat	0,67%	1,27%	-	-	
		Sub Kegiatan :						
		1.29	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Keluaran (output) : Jumlah LPD yang mengikat kriterianya menjadi sehat	15	15	371.000.000	408.100.000
				Penyusunan Pararem LPD	1	1	-	-
		1.30	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Keluaran (output) : Jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi	15	15	471.781.792	518.959.792
				Penyusunan Pararem BUPDA	-	1	-	-
		1.31	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	Keluaran (output) : Jumlah kerjasama perekonomian Desa Adat yang difasilitasi	4	4	323.836.000	356.219.600
	9	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat		Keluaran (output) : Jumlah SDM Desa Adat yang memilki kompetensi menyusun perencanaan pembangunan Desa Adat	300	300	983.104.992	1.110.675.792
				Hasil (outcome) : Persentase Desa Adat yang sudah menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Adat sesuai dengan ketentuan	80%	90%	-	-
		Sub Kegiatan :						
		1.32	Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan	Keluaran (output) : Jumlah laporan pendataan penyelenggaraan pembangunan di desa adat	1	1	250.000.000	250.000.000
		1.33	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan	Keluaran (output) : Jumlah Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun Desa Adat yang tersusun	1	-	299.999.992	410.675.792
				Jumlah Desa Adat yang sudah menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa Adat yang berkualitas	200	200	-	-

		1.34	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah data dan informasi potensi Desa Adat	1	-	433.105.000	450.000.000
				Jumlah Juknis proposal pencairan dana Subak dan Subak Abian	1	1	-	-
				Jumlah proposal pencairan dana Subak dan Subak Abian yang diverifikasi	2.726	2.726	-	-
	10	Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia		Keluaran (output) : Jumlah SDM di Desa Adat yang dibina	300	300	5.497.737.204	7.127.954.000
				Hasil (outcome) : Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten	300	300	-	-
		Sub Kegiatan :						
		1.35	Pembinaan Prajuru Desa Adat	Keluaran (output) : Jumlah Prajuru Desa Adat yang memahami tata kelola pemerintahan Desa Adat	300	300	541.047.650	627.954.000
		1.36	Pembinaan Pendidikan Pasraman	Jumlah Pasraman Non Formal di Desa Adat yang dikembangkan	27	57	359.738.740	500.000.000
		1.37	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Keluaran (output) : Jumlah pedoman/juknis pembentukan Lembaga Adat yang disusun	3	0	4.596.950.814	6.000.000.000
				Jumlah Paiketan/Pasikian Lembaga Adat yang dibentuk	2.000	2.000	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional berguna untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, saling mendukung dalam pencapaian kinerja antara Kementerian terkait, Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dan Dinas yang mengurus Adat dan *Subak* di Kabupaten / Kota se Bali. Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara. Program Prioritas Nasional dibidang Kebudayaan, salah satunya yakni meningkatkan pemaajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan indikator indeks pembangunan kebudayaan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Program Pemaajuan Masyarakat Adat Bali merupakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan. Mengacu pada program prioritas nasional serta program dan urusan yang diemban, maka Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 telah merumuskan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintahan Desa Adat, melalui :
 - a. Peningkatan kualitas SDM kelembagaan pemerintahan Desa Adat;
 - b. Peningkatan kuantitas kelembagaan Desa Adat yang dibentuk sesuai dengan aturan;
 - c. Peningkatan kualitas perencanaan APB Desa Adat;
 - d. Peningkatan kualitas kerja sama pembangunan Desa Adat.
 - e. Penyusunan pedoman/juknis kelembagaan dan tata kelola Desa Adat;

2. Peningkatan kualitas lembaga Desa Adat, melalui :
 - a. Peningkatan kualitas SDM Lembaga Adat;
 - b. Penyusunan pedoman/juknis pembentukan *Pasraman* Non Formal;
 - c. Penyusunan pedoman / juknis pembentukan Lembaga Adat;
 - d. Memfasilitasi Pembentukan Lembaga adat di Desa Adat / Kecamatan / Kabupaten / Kota / Provinsi.
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Desa Adat, melalui :
 - a. Pemantapan kebijakan tata Kelola modern pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa Adat sesuai Pergub Bali nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali
 - b. Peningkatan kualitas SDM Prajuru Desa Adat dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran sesuai ketentuan;
 - c. Peningkatan pengawasan pemanfaatan dana penguatan desa adat yang dananya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali;
 - d. Penyusunan Juknis Pengelolaan Keuangan Desa Adat;
 - e. Peningkatan kualitas *Patengen* Dana Desa Adat.
 - f. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT)
 - g. Fasilitasi Klinik Konsultasi pengelolaan tata kelola keuangan Desa Adat
 - h. Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa Adat
3. Peningkatan kuantitas LPD dengan kriteria sehat , melalui :
 - a. Penyusunan Regulasi tentang *Labda Pacingkremen* Desa Adat (LPD)
 - b. Penyusunan Pararem LPD Provinsi Bali;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM LPD;
 - d. Peningkatan kualitas data dan informasi perkembangan LPD.
4. Peningkatan kuantitas Desa Adat yang membentuk BUPDA berkualitas, melalui :
 - a. Pendataan Desa Adat yang sudah membentuk sektor riil;
 - b. Peningkatan pemahaman *Prajuru* Desa Adat tentang BUPDA;
 - c. Memfasilitasi pembentukan BUPDA di Desa Adat di Kab/Kota se-Bali;
 - d. Penyusunan data dan informasi Desa Adat yang sudah membentuk BUPDA;
 - e. Pembuatan Sistem Tata Kelola BUPDA Desa Adat Berbasis Aplikasi.

5. Peningkatan Desa Adat yang mengadakan kerjasama perekonomian Desa Adat, melalui :
 - a. Penyusunan Pedoman Teknis kerjasama perekonomian Desa Adat;
 - b. Peningkatan pemahaman pengurus Desa Adat dalam melihat peluang untuk mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga/pelaku usaha.
 - c. Memfasilitasi Desa Adat dalam kerjasama perekonomian Desa Adat
6. Pemantapan registrasi *Awig - Awig* dan *Pararem*, melalui :
 - a. Penyusunan Pedoman penyusunan produk hukum adat;
 - b. Peningkatan kapasitas SDM Desa Adat dalam menyusun Awig - Awig dan Pararem.
 - c. Pendampingan Penyuratan *Awig -Awig* dan *Pararem*
 - d. Pemantapan dan penyempurnaan Aplikasi JIDHAT (Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat)
7. Peningkatan kualitas *Kertha Desa* dalam penyelesaian wicara adat, melalui :
 - a. Penyusunan Pedoman tatacara *nepasin wicara*/penyelesaian masalah adat;
 - b. Sosialisasi/Desiminasi Petunjuk Teknis Penyelesaian Wicara Adat;
 - c. Peningkatan kualitas Tim *Panureksa Wicara* Adat;
 - d. Memfasilitasi penyelesaian *Wicara* Adat.
8. Peningkatan kualitas SDM *Kertha Desa* Adat, melalui :
 - a. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tata Kehidupan di Desa Adat Berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi;
 - b. Peningkatan kualitas SDM Desa Adat dalam *nepasin wicara*/ penyelesaian *wicara* adat;
 - c. Peningkatan pemahaman krama desa adat tentang tata kehidupan di desa adat Berdasarkan Nilai-Nilai *Sad Kerthi*.
 - d. Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat.
 - e. Memantapkan Pelaksanaan Kesepakatan tentang Pelaksanaan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDUBERADAT)
 - f. Peningkatan Kapasitas Forum SIPANDUBERADAT di Desa Adat
 - g. Peningkatan Kapasitas Forum SIPANDUBERADAT tingkat Provinsi, Kab/Kota, dan Kecamatan

- h. Publikasi SIPANDU BERADAT melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online
- 9. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Adat, melalui :
 - a. Peningkatan kualitas data pembangunan di Desa Adat.
 - b. Sosialisasi dan Desiminasi Rujukan Pemanfaatan *Wewidangan Desa Adat* ;
 - c. Penetapan pilot project dan Pendampingan Pemanfaatan wewidangan Desa Adat.
- 10. Peningkatan kapasitas SDM perencanaan pembangunan Desa Adat , melalui :
 - a. Penyusunan Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun Desa Adat ;
 - b. Peningkatan kompetensi SDM Desa Adat dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa Adat;
 - c. Pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun Desa Adat.
- 11. Peningkatan pemanfaatan potensi yang dimiliki Desa Adat, melalui :
 - a. Desiminasi Pergub 25 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan kepada pengelola Daya Tarik Wisata dan Pelaku Pariwisata di 9 Kab/Kota di Bali serta *Bandesa* Madya Kab/Kota melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online ;
 - b. PemutAwal Perubahanan dan Sosialisasi Data Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan Umat Hindu ;
 - c. Melaksanakan pendataan dan penataan Subak dan Subak Abian;
 - d. Melaksanakan Verifikasi proposal BKK Subak dan Subak Abian.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2020 – 2023 yang akan dicapai oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah: "TERWUJUDNYA *KASUKRETAN* DESA ADAT"

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja.
2. Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa Adat;

3. Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat;
4. Meningkatnya kualitas hukum Adat;
5. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat;

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 dirancang tetap sama, lebih jelas disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2022

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Renja	Target Rancangan Akhir Perubahan Renja
				Tahun 2019	Tahun 2022	Tahun 2022
1	Terwujudnya Kasukretan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	Persentase (%)	-	12,06	12,06
2	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	-	82	82
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Persentase (%)	-	31,81	31,81
4	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	Persentase (%)	-	14,53	14,53
5	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	Persentase (%)	-	94,77	94,77
6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	Persentase (%)	-	77,03	77,03

3.3. Program dan Kegiatan.

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah tahun 2022 pada urusan bidang pemerintahan adat di Provinsi Bali telah ditetapkan program, Kegiatan, Sub kegiatan dan pagu indikatif. Penetapan Program, kegiatan dan sub kegiatan ini untuk mendukung tercapainya Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu "**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, khususnya pada **Misi 12** : yaitu Penguatan Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Desa Pakraman/Desa Adat Dan Subak Dalam Menyelenggarakan Kehidupan *Krama* Bali Yang Meliputi *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*. Program dan Kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat pada Tahun Anggaran 2022 adalah untuk mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah yaitu Bidang 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya. Dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja tahun 2022 dirancang 10 (sepuluh) kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan. Pagu indikatif pada Anggaran Induk dirancang sebesar Rp. 479.071.323.992,- (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), sedangkan pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2022 pagu indikatif dianggarkan sebesar Rp. 483.384.050.031,- (empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu tiga puluh satu rupiah) atau bertambah sebesar Rp.4.312.726.039 (empat miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah) yang diperuntukkan untuk membayar kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN serta biaya operasional Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi, Kabupaten / kota dan Kecamatan. Rumusan Rancangan Akhir perubahan program dan kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rancangan Akhir Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Bali

Organisasi/Sub SKPD : 5.01.01.01 - Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														479.071.323.992	483.384.050.031			541.630.818.449
2	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														15.658.077.498	15.970.803.537			20.608.909.265
2	2	0	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														13.861.000	13.861.000			83.297.665
2	2	0	1	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	9 Dokumen	9 Dokumen	6 %	6 %	13.861.000	13.861.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	83.297.665		
2	2	0	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														9.255.081.424	9.567.807.463			11.659.511.600
2	2	0	1	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang diproses	Persentase pelayanan administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	52 Dokumen	52 Dokumen	100 %	100 %	9.255.081.424	9.567.807.463	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	11.659.511.600		

2	2	0	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah									926.368.900	926.368.900					1.864.000.000		
2	2	0	1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan Kantor	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah komponen instalasi listrik/peneran- gan kantor yang diadakan dan siap pakai	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	794 Unit	794 Unit	100 %	100 %	24.354.200	24.354.200	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	46.000.000
2	2	0	1	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda- an	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah jasa penggandaan dan cetak yang diproses dan siap pakai	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	2937 Unit	2937 Unit	100 %	100 %	46.565.700	46.565.700	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	130.000.000
2	2	0	1	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang diadakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	17.216.000	17.216.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	8.000.000
2	2	0	1	0	Penyeleng- araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakann	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	341 Kali	341 Kali	100 %	100 %	838.233.000	838.233.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	1.680.000.000
2	2	0	1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									1.227.798.000	1.227.798.000					2.510.000.000		
2	2	0	1	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses	Persentase lancarnya pelayanan perkantoran dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	15 Unit	15 Unit	100 %	100 %	1.227.798.000	1.227.798.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	2.510.000.000

2	2	0	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									944.382.250	944.382.250				1.072.100.000			
2	2	0	1	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah Unit alat Tulis Kantor yang tersedia dan siap pakai	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	35 Unit	35 Unit	100 %	100 %	944.382.250	944.382.250	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	1.072.100.000
2	2	0	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									3.290.585.924	3.290.585.924				3.420.000.000			
2	2	0	1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan siap pakai	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	1.384.600.896	1.384.600.896	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	1.185.000.000
2	2	0	1	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah jasa kebersihan kantor dan taman yang dilaksanakan Jumlah Jasa Pemeliharaan Gedung kantor yang dilaksanakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	1.905.985.028	1.905.985.028	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	2.235.000.000

2	2	0			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI										463.413.246.494	467.413.246.494			521.021.909.184			
2	2	0	1		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat										459.066.605.985	463.066.605.985			510.500.000.000			
2	2	0	1	0	Pembinaan Pemerintah Desa Adat	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelengga rakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	Jumlah Desa Adat yang Menyampaika Dokumen Penganggaran Tepa Waktu dan sesuai Ketentuan Jumlah Desa Adat Yang Menyampaika Dokumen Pertanggungj awaba Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesua ketentuan Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa ada yang disusun Jumlah Proposal Pencairan Dana Des Adat yang diverifika	Persentase Desa Adat yang tata kelola pemerintahan Desa Adatnya baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1493 Desa Adat 1493 Desa Adat 300 Desa Adat 1 Juknis 1493 Proposal	1493 Desa Adat 1493 Desa Adat 300 Desa Adat 1 Juknis 1493 Proposal	75 %	75 %	457.870.600.241	461.870.600.241	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelengga ra kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	100 Persen	509.100.000.000

2	2	0	1	0	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggara rakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	Jumlah Produk Hukum Adat yang diregistrasi Jumlah Produk Hukum Adat yang Teraploud melalui Aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT) Jumlah Wicara Adat Yang di Fasilitas	Persentase Desa Adat yang tata kelola pemerintahan Desa Adatnya baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	500 Produk Hukum 375 Produk Hukum 4 Wicara	500 Produk Hukum 375 Produk Hukum 4 Wicara	75 %	75 %	1.196.005.744	1.196.005.744	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggara ra kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	100 Persen	1.400.000.000
2	2	0	1		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat										705.727.988	705.727.988					1.283.279.392	
2	2	0	1	0	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggara rakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	Jumlah LPD Yang Meningkatkan Kriteriaanya Menjadi Sehat Jumlah Pararem LPD yang tersusun	Persentase Desa adat yang memiliki Lembaga Perekonomian Desa Adat yang sehat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	15 LPD 1 Pararem	15 LPD 1 Pararem	3,82 %	3,82 %	151.055.550	151.055.550	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggara ra kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	100 Persen	408.100.000

2	2	0	1	0	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelengga rakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	Jumlah Desa Adat yang memiliki Kerjasama Jumlah Pararem BUPDA yang tersusun Jumlah Pararem Kerjasama yang tersusun Jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi	Persentase Desa adat yang memiliki Lembaga Perekonomian Desa Adat yang sehat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen 1 Pararem 1 Pararem 15 BUPDA	2 Dokumen 1 Pararem 1 Pararem 15 BUPDA	3,82 %	3,82 %	554.672.438	554.672.438	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelengga ra kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	100 Persen	875.179.392
2	2	0	1	0	Penyelenggaraan Desa Adat											632.068.892	632.068.892					2.110.675.792
2	2	0	1	0	Koordinasi dan Penyeleng araan Palemahan	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam penyelenggar aan kegiatan parahyangan, Pawongan dan Palemahan Persentase Subak yang berdaya dalam menyelengga rakan kegiatan parahyanga Pawongan dan Palemahan	Jumlah data dan informasi potensi desa adat yang tersusun Jumlah laporan Pendataan Subak dan Subak Abian yang tersusun Jumlah proposal pencairan dana subak dan subak abian yang diverifikasi	Persentase Desa Adat yang sudah menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Adat sesuai dengan ketentuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen 2726 Dokume	1 Dokumen 1 Dokumen n 2726 Dokume	40 % n	40 %	632.068.892	632.068.892	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase Desa Adat yang berdaya dalam penyelenggar aan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan Persentase Subak yang berdaya dalam penyelenggar akan kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan	100 Persen 100 Persen	2.110.675.792

2	2	0	1		Pembinaan Sumber Daya Manusia										3.008.843.629	3.008.843.629					7.127.954.000	
2	2	0	1	0	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggarakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	Jumlah buku/pedoman/juk Lembaga Adat yang disusun Jumlah Paiketan/Pasikian Lembaga Adat yang dibentuk	nis Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 buku/pedoman 2000 Paiketan	a3nb/jukun /ispedom /P2a0s0ik0i aPnaiketan	an/juknis / 300 Orang Pasikian	300 Orang	3.008.843.629	3.008.843.629	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Des Adat yang berdaya dalam menyelenggarakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	a aya kan 100 Persen	7.127.954.000
TOTAL															479.071.323.992	483.384.050.031					541.630.818.449	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
TAHUN 2022

Keberhasilan pencapaian pembangunan dalam memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam mewujudkan *kesukretan* Desa Adat di Provinsi Bali, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 yang bersumber dari APBD difokuskan kepada :

- A. Kerangka pendanaan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat, melalui :
1. Pembinaan Pemerintahan Desa Adat, difokuskan pada :
 - a. Sosialisasi dan Desiminasi Juknis Lembaga Pemerintahan Desa Adat;
 - b. Pendataan dan Penataan Lembaga Pemerintahan Desa Adat;
 - c. FGD Kerjasama Desa Adat;
 - d. Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Desa Adat;
 - e. Sosialisasi Tipologi Desa Adat;
 - f. Sosialisasi Pedoman *Ngadegang Bandesa* Adat atau sebutan lain dan *Prajuru* Desa Adat;
 - g. Pengukuhan *Bandesa* Adat atau sebutan lain dan *Prajuru* Desa Adat sesuai dengan Perda nomor 4 Tahun 2019;
 - h. Pembayaran Honorarium *Prajuru* Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
 - i. Memantapkan kebijakan tata Kelola modern pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa Adat sesuai Pergub Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
 - j. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT);
 - k. Pendampingan dan Verifikasi Proposal Dana Penguatan Desa Adat Tahun 2022;
 - l. Pencairan 1.493 Dana Penguatan Desa Adat Tahun 2022;
 - m. Pencairan Dana Percontohan Peningkatan Kapasitas SDM Adat di Perguruan Tinggi 2022;
 - n. Penyusunan Juknis Pengelolaan Keuangan Desa Adat Tahun 2024
 - o. Bimtek pengelolaan keuangan Desa Adat;

- p. Fasilitasi Klinik Konsultasi pengelolaan tata kelola keuangan Desa Adat ;
 - q. Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa Adat.
2. Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat, difokuskan pada :
- a. Desiminasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali beserta turunannya melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online;
 - b. Pendampingan Penyuratan *Awig –Awig* dan *Pararem*;
 - c. Sosialisasi Pedoman Teknis Penyuratan Awig-Awig dan Pararem;
 - d. *Registrasi Awig-Awig dan Pararem* Desa Adat;
 - e. Pemantapan penyempurnaan Aplikasi JIDHAT (Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Adat);
 - f. Sosialisasi/Desiminasi Petunjuk Teknis Penyelesaian Wicara Adat;
 - g. Memfasilitasi penyelesaian Wicara Adat;
 - h. Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat;
 - i. Memantapkan Pelaksanaan Kesepakatan Tentang Pelaksanaan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDUBERADAT);
 - j. Peningkatan Kapasitas Forum SIPANDUBERADAT di Desa Adat;
 - k. Peningkatan Kapasitas Forum SIPANDUBERADAT tingkat Provinsi, Kab/Kota, dan Kecamatan;
 - l. Publikasi SIPANDUBERADAT melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online.
- B. Kerangka pendanaan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat, melalui :
1. Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat, difokuskan pada :
- a. Penyusunan draft Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang *Labda Pacingkremen* Desa Adat (LPD)
 - b. Sosialisasi Perda *Labda Pacingkremen* Desa Adat (LPD)
 - c. Sosialisasi Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda *Labda Pacingkremen* Desa Adat (LPD)
 - d. Bimtek Peningkatan Kapasitas Panureksa LPD Kabupaten/Kota
 - e. Monev dan pendataan LPD

2. Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat, difokuskan pada :
 - a. Pendataan Desa Adat yang sudah membentuk sektor riil
 - b. Sosialisasi Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUPDA
 - c. Fasilitasi pembentukan BUPDA di Desa Adat di Kab/Kota se-Bali
 - d. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelolaan BUPDA
 - e. Pembuatan Sistem Tata Kelola BUPDA Desa Adat Berbasis Aplikasi
 - f. Diseminasi Pedoman Teknis Kerjasama Perekonomian Desa Adat
 - g. Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Perekonomian Desa Adat
 - h. Monitoring dan Pendataan Kerjasama Perekonomian Desa Adat
- C. Kerangka pendanaan Penyelenggaraan Desa Adat, melalui :
1. Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan, difokuskan pada :
 - a. Desiminasi Pergub 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan kepada pengelola Daya Tarik Wisata dan Pelaku Pariwisata di 9 Kab/Kota di Bali serta *Bandes* Madya Kab/Kota melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online
 - b. PemutAwal Perubahanan dan Sosialisasi Data Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan Umat Hindu
 - c. Sosialisasi dan Desiminasi Rujukan Pemanfaatan *Wewidangan Desa Adat*
 - d. Penetapan *pilot project* dan Pendampingan Pemanfaatan *wewidangan* Desa Adat
 - e. Penyusunan Juknis Perencanaan Pembangunan Desa Adat tahun 2024
 - f. Sosialisasi Juknis Perencanaan Pembangunan Desa Adat Tahun 2024
 - g. Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat Tahun 2024
 - h. Pemutahiran data dan informasi potensi desa adat
 - i. PemutAwal Perubahanan Data *Subak* dan *Subak Abian*
 - j. Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab/Kota dan Desa untuk *Subak* dan *Subak Abian* Tahun 2023
 - k. *Sosialisasi* Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab/Kota dan Desa untuk *Subak* dan *Subak Abian* Tahun 2023

- I. Verifikasi usulan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Subak dan Subak Abian Tahun 2024

D. Kerangka pendanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, melalui :

1. Pembinaan SDM Lembaga Adat, difokuskan pada :
 - a. Bimtek Prajuru Desa Adat
 - b. Pesamuan Agung MDA Provinsi Bali
 - c. Sosialisasi Modul / Pedoman / Juknis
 - d. Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan
 - e. Pendampingan Pembentukan *Pasraman Non Formal* di Desa Adat
 - f. Bimtek Pasraman Non Formal
 - g. Pendataan, Pembentukan, dan Pembinaan *Pasraman Non Formal* di Desa Adat
 - h. Monitoring Pasraman Non Formal di Desa Adat
 - i. Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas *Pasikian / Paiketan* Lembaga Adat Tingkat Provinsi , Kab/Kota dan Kecamatan (PAKIS Bali, *Yowana* dan *Pacalang*)
 - j. Sosialisasi Lembaga Adat melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online
 - k. Rakor PAKIS Bali Tingkat Provinsi
 - l. Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan PAKIS Bali
 - m. Sosialisasi Buku *Pacalang* Bali
 - n. Publikasi *Pacalang* Bali melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online
 - o. Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan *Pacalang* Bali
 - p. Sosialisasi *Yowana* Bali
 - q. Publikasi *Yowana* Bali melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online
 - r. Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan *Yowana* Bali

Pada Rancangan Akhir Perubahan Renja tahun 2022 dirancang kerangka pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dilaksanakan melalui 2 (dua) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana / pagu indikatif sebesar Rp. 483.384.050.031,- (empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu tiga puluh satu rupiah), lebih tinggi dari pagu

induk yang dianggarkan Rp. 479.071.323.992,- (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), atau bertambah sebesar Rp. 4.312.726.039 (empat miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah) yang dirinci sesuai dengan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan 6 (enam) Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 15.970.803.537,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) lebih tinggi dari pagu induk yang dianggarkan Rp. 15.658.077.498,00 (lima belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), atau bertambah sebesar Rp.312.726.039,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah);
2. Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali dengan 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 467.413.246.494,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), lebih tinggi dari pagu induk yang dianggarkan Rp. 463.413.246.494,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), atau bertambah sebesar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah);

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 secara rinci dituangkan dalam Tabel 4.1

2	2	0	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah									926.368.900	926.368.900					1.864.000.000		
2	2	0	1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan Kantor	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah komponen instalasi listrik/peneran- gan kantor yang diadakan dan siap pakai	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	794 Unit	794 Unit	100 %	100 %	24.354.200	24.354.200	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	46.000.000
2	2	0	1	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda- an	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah jasa penggandaan dan cetak yang diproses dan siap pakai	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	2937 Unit	2937 Unit	100 %	100 %	46.565.700	46.565.700	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	130.000.000
2	2	0	1	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang diadakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	17.216.000	17.216.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	8.000.000
2	2	0	1	0	Penyeleng- araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakann	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	341 Kali	341 Kali	100 %	100 %	838.233.000	838.233.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	1.680.000.000
2	2	0	1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									1.227.798.000	1.227.798.000					2.510.000.000		
2	2	0	1	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses	Persentase lancarnya pelayanan perkantoran dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	15 Unit	15 Unit	100 %	100 %	1.227.798.000	1.227.798.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	2.510.000.000

2	2	0	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										944.382.250	944.382.250					1.072.100.000	
2	2	0	1	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah Unit alat Tulis Kantor yang tersedia dan siap pakai	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	35 Unit	35 Unit	100 %	100 %	944.382.250	944.382.250	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	1.072.100.000
2	2	0	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3.290.585.924	3.290.585.924					3.420.000.000	
2	2	0	1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan siap pakai	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	1.384.600.896	1.384.600.896	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	1.185.000.000
2	2	0	1	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah jasa kebersihan kantor dan taman yang dilaksanakan Jumlah Jasa Pemeliharaan Gedung kantor yang dilaksanakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai Evaluasi	82 Nilai Evaluasi	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	100 %	100 %	1.905.985.028	1.905.985.028	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	2.235.000.000

2	2	0			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI										463.413.246.494	467.413.246.494			521.021.909.184			
2	2	0	1		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat										459.066.605.985	463.066.605.985			510.500.000.000			
2	2	0	1	0	Pembinaan Pemerintah an Desa Adat	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelengga rakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	Jumlah Desa Adat yang Menyampaika Dokumen Penganggaran Tepa Waktu dan sesuai Ketentuan Jumlah Desa Adat Yang Menyampaika Dokumen Pertanggungj awaba Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesua ketentuan Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa ada yang disusun Jumlah Proposal Pencairan Dana Des Adat yang diverifika	Persentase Desa Adat yang tata kelola pemerintahan Desa Adatnya baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1493 Desa Adat 1493 Desa Adat 300 Desa Adat 1 Juknis 1493 Proposal	1493 Desa Adat 1493 Desa Adat 300 Desa Adat 1 Juknis 1493 Proposal	75 %	75 %	457.870.600.241	461.870.600.241	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelengga ra kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	100 Persen	509.100.000.000

2	2	0	1	0	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggara rakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	Jumlah Produk Hukum Adat yang diregistrasi Jumlah Produk Hukum Adat yang Teraploud melalui Aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT) Jumlah Wicara Adat Yang di Fasilitasi	Persentase Desa Adat yang tata kelola pemerintahan Desa Adatnya baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	500 Produk Hukum 375 Produk Hukum 4 Wicara	500 Produk Hukum 375 Produk Hukum 4 Wicara	75 %	75 %	1.196.005.744	1.196.005.744	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggara kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	100 Persen	1.400.000.000
2	2	0	1		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat											705.727.988	705.727.988					1.283.279.392
2	2	0	1	0	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggara rakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	Jumlah LPD Yang Meningkatkan Kriteriaanya Menjadi Sehat Jumlah Pararem LPD yang tersusun	Persentase Desa adat yang memiliki Lembaga Perekonomian Desa Adat yang sehat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	15 LPD 1 Pararem	15 LPD 1 Pararem	3,82 %	3,82 %	151.055.550	151.055.550	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggara kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	100 Persen	408.100.000

2	2	0	1	0	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelengga rakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	Jumlah Desa Adat yang memiliki Kerjasama Jumlah Pararem BUPDA yang tersusun Jumlah Pararem Kerjasama yang tersusun Jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi	Persentase Desa adat yang memiliki Lembaga Perekonomian Desa Adat yang sehat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen 1 Pararem 1 Pararem 15 BUPDA	2 Dokumen 1 Pararem 1 Pararem 15 BUPDA	3,82 %	3,82 %	554.672.438	554.672.438	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelengga ra kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	100 Persen	875.179.392
2	2	0	1	0	Penyelenggaraan Desa Adat											632.068.892	632.068.892				2.110.675.792	
2	2	0	1	0	Koordinasi dan Penyeleng araan Palemahan	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam penyelenggar aan kegiatan parahyangan, Pawongan dan Palemahan Persentase Subak yang berdaya dalam menyelengga rakan kegiatan parahyanga Pawongan dan Palemahan	Jumlah data dan informasi potensi desa adat yang tersusun Jumlah laporan Pendataan Subak dan Subak Abian yang tersusun Jumlah proposal pencairan dana subak dan subak abian yang diverifikasi	Persentase Desa Adat yang sudah menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Adat sesuai dengan ketentuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen 2726 Dokume	1 Dokumen 1 Dokumen n 2726 Dokume	40 % n	40 %	632.068.892	632.068.892	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase Desa Adat yang berdaya dalam penyelenggar aan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan Persentase Subak yang berdaya dalam penyelenggar akan kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan	100 Persen 100 Persen	2.110.675.792

2	2	0	1		Pembinaan Sumber Daya Manusia										3.008.843.629	3.008.843.629					7.127.954.000	
2	2	0	1	0	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggarakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	Jumlah buku/pedoman/juk Lembaga Adat yang disusun Jumlah Paiketan/Pasikian Lembaga Adat yang dibentuk	nis Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 buku/pedoman 2000 Paiketan	a3nb/jukun /ispedom /P2a0s0ik0i aPnaiketan	an/juknis /300 Orang Pasikian	300 Orang	3.008.843.629	3.008.843.629	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Des Adat yang berdaya dalam menyelenggarakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	aya kan 100 Persen	7.127.954.000
TOTAL															479.071.323.992	483.384.050.031					541.630.818.449	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2022 mengacu pada Rancangan Akhir Perubahan RKPDP Provinsi Bali Tahun 2022, serta Agenda Pembangunan Nasional dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan berpengaruh terhadap Bidang Prioritas Pembangunan Bali, khususnya Bidang 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya.

Penyusunan rancangan akhir perubahan program dan kegiatan serta pengusulan kebutuhan dana / pagu indikatif mengacu pada hasil evaluasi dan analisis terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 sampai dengan triwulan II serta target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang diukur berdasarkan indikator - indikator sasaran yang menjadi IKU dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Apabila usulan kegiatan dan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, hal ini akan berimplikasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi, sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 ini diupayakan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah - kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berkewajiban menjaga konsistensi antara Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 dengan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP) Provinsi Bali Tahun 2022;

2. Dokumen Perubahan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2022 ini akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan perubahan kegiatan / aktivitas dan anggaran yang dituangkan dalam RKA .
3. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan perubahan Renja 2022, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan perubahan Renja 2022.

Pada Rancangan Akhir Perubahan Renja tahun 2022 dirancang kerangka pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dilaksanakan melalui 2 (dua) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana / pagu indikatif sebesar sebesar Rp. 483.384.050.031,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu tiga puluh satu rupiah), lebih tinggi dari pagu induk yang dianggarkan sebesar Rp. 479.071.323.992,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), atau bertambah sebesar Rp.4.312.726.039 (empat miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah). Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan yang dihasilkan baik dalam bentuk regulasi maupun kebijakan operasional dan teknis lainnya adalah sebagai salah satu upaya dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan dalam upaya mempercepat terwujudnya *kasukretan* Desa Adat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan strategis yang terarah dan didukung oleh lingkungan yang kondusif, maka pembangunan dapat dilakukan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan demi terwujudnya *kasukretan* Desa Adat yang berkualitas.

Bali, Agustus 2022

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA DINAS
	I G. A. K. Kartika Jaya Seputra
	NIP. 19680613 199403 1 012

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023;
 - b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 26 Januari 2022

KEPALA DINAS,

G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

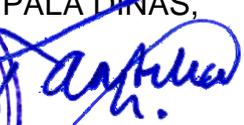


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS
PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2023

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Sekretaris : I Nyoman Suparwa, SE, Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
3. Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
4. Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
6. Kadek Doni Raditya, SSTP, M.SI Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
7. I Putu Andhika Putra, S.STP Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
8. Ida Bagus Alit Dharmaja, SE Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
9. I Gusti Agung Putra, S.SOS, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
10. I Made Suadi, S.SOS, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
11. Drs. I Gede Made Sukrawan, M.Si Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;

12. I Nyoman Bagus Mataram Putra, SH. M.Si, Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
13. Ni Made Sristiati, S.Sos, Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
14. I Gede Adi Wijaya Asa, S.Sos, MAP, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
15. I Nyoman Sugiarta, S.Sos, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
16. Suadnyani Tuti Indrajani, SSTP,M.Si Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

KEPALA DINAS,

G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Bali sebagai laporan
2. Wakil Gubernur Bali di Bali sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali sebagai laporan